



MENILAI DINAMIKA KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2005-2023

Assessing Poverty Dynamics in South Sulawesi Province in 2005-2023

Nurfikasari^{1*}, Wardihan Sabar², Baso Iwang³

^{1*,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*e-mail: nurfikasarifika4@gmail.com

Article History: Received: July 27, 2024; Revised: August 23, 2024; Accepted: August 31, 2024; Published: September 05, 2024

ABSTRAK

Kemiskinan tetap menjadi masalah ekonomi yang serius yang menghambat pemenuhan kebutuhan dasar individu. Penelitian ini mengkaji dinamika kemiskinan dengan meninjau peran faktor-faktor determinan seperti ketimpangan pembangunan, angka harapan hidup (AHH), produk domestik regional bruto (PDRB), dan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan untuk periode 2005-2023. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan model regresi linear berganda, diolah menggunakan perangkat lunak Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan, dan inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sebaliknya, AHH dan PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Temuan ini menekankan pentingnya strategi yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, terutama dengan memajukan sektor kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat miskin.

Kata kunci: Kemiskinan, Ketimpangan Pembangunan, Harapan Hidup, PDRB, Inflasi

ABSTRACT

Poverty remains a serious economic issue that hinders the fulfillment of individuals' basic needs. This study examines the dynamics of poverty by analyzing the role of determinant factors such as development inequality, life expectancy (AHH), gross regional domestic product (GRDP), and inflation in South Sulawesi Province. The data used in this study are secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics (BPS) of South Sulawesi for the period 2005-2023. This research employs a quantitative method with a multiple linear regression model, processed using the Eviews 13 software. The results show that development inequality and inflation does not significantly affect poverty levels in South Sulawesi Province. On the other hand, life expectancy and GRDP have a significant negative effect. These findings highlight the importance of focusing on effective strategies to alleviate poverty, advancing the health sector to improve the population's quality of life, promoting economic growth, and ensuring that the benefits of this growth are distributed equitably, especially to the economically vulnerable and the poor.

Keywords: Poverty, Development Inequality, Life Expectancy, GRDP, Inflation.



PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihadapi saat ini, baik negara maju maupun negara berkembang tidak bisa terlepas dari permasalahan tersebut. Kemiskinan bagaikan jurang yang memisahkan seseorang dari kebutuhan pokoknya. Kemiskinan merujuk pada kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya yang dibutuhkan seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kemiskinan dapat diukur dari sudut pandang pendapatan, dimana jika seseorang memiliki pendapatan dibawah batas kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah (Susanto & Pangesti, 2021).

Kemiskinan terbagi atas dua konsep, yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut (BPS, 2016). Kemiskinan relatif terjadi apabila kebijakan pembangunan tidak merata sehingga belum dapat mencakup semua golongan masyarakat, oleh karena itu mengakibatkan terjadinya ketimpangan pendapatan. Sedangkan, kemiskinan absolut adalah kondisi dimana seseorang atau kelompok tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimumnya. Seseorang dikatakan miskin jika pengeluaran per kapitanya dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hal tersebut BPS mengukur garis kemiskinan dengan dua metode yakni dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yaitu kurang dari 2100 kalori perkapita perhari dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKN). Total dari GK itu diukur dengan menjumlahkan GKM dan GKN. Pada tahun 2023 rata-rata nasional GK per orang per bulan adalah Rp. 550.458, artinya jika pengeluaran seseorang itu kurang dari rata-rata nasional maka dikategorikan miskin. Jadi berdasarkan perhitungan tersebut minimum pendapatan yang diperoleh seseorang dalam sehari yakni sebesar Rp. 18.349, namun perlu diperhatikan bahwa BPS melihat kemiskinan berdasarkan pengeluaran bukan dari pendapatan (Aeni, 2017).

Menurut Ragnar Nurkse (1953) yang menjelaskan tentang teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menggambarkan serangkaian kekuatan yang saling berinteraksi dan menyebabkan kesulitan dalam mencapai pembangunan yang lebih baik. Seperti yang ia jelaskan bahwa pepatah kuno "*...a poor country is poor because it is poor...*" ini diakibatkan beberapa faktor seperti pendapatan dan pendidikan yang rendah, kesehatan yang buruk serta terbatasnya akses untuk layanan publik (Rahman & Alamsyah, 2019). Sedangkan, Menurut Townsend dalam teori kemiskinan absolut menjelaskan bahwa Kemiskinan timbul ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan untuk hidup. Sehingga, kemiskinan menjadi target pembangunan yang perlu dievaluasi. Adapun menurut Frank (1967) dalam teori ketergantungan (*depedency theory*) menggambarkan bahwa negara berkembang akan terus bergantung pada negara maju.

Berdasarkan ketiga teori tersebut memberikan gambaran paling relevan dengan kemiskinan di Indonesia, dimana seringkali kemiskinan itu sulit diputus, baik itu karena rendahnya produktivitas, kurangnya modal, dan terbatasnya akses teknologi serta adanya ketergantungan terhadap komoditas tertentu sehingga berimbas pada parahnya tingkat kemiskinan.

Sulawesi Selatan adalah provinsi yang terdiri dari 21 kabupaten dan 3 kota, jika dilihat wilayah Sulawesi Selatan yang cukup luas tak terlepas dari permasalahan yang sama, yakni peningkatan angka kemiskinan. bahwa jumlah populasi penduduk miskin di Sulawesi Selatan pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 Sulawesi Selatan memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yakni 800,24 ribu jiwa penyebab utamanya adalah wabah Covid-19 yang menyerang seluruh dunia, sehingga terjadi kelumpuhan ekonomi. Hal ini menyebabkan lonjakan penduduk miskin akibat banyaknya pekerja yang dirumahkan. Di sisi lain, jumlah penduduk miskin terkecil itu terjadi tahun 2019 dengan persentase 16,12% atau sekitar 759,58 ribu jiwa. Namun, di 2021 terjadi penurunan sebanyak 0,73% atau sekitar 34,78 ribu jiwa. Berbeda dengan tahun 2022-2023 kembali terjadi peningkatan walaupun tidak secara signifikan yakni sekitar 0,35% di tahun 2022 atau sekitar 16,86 ribu jiwa. Begitupun pada tahun 2023 terjadi kenaikan sebanyak 0,13% dari tahun sebelumnya yakni 6,53 ribu jiwa.

Pertumbuhan ekonomi yang lambat menjadi hambatan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan tersebut, termasuk masalah lainnya adalah munculnya ketimpangan pembangunan. pada lima tahun terakhir Sulawesi Selatan mengalami perubahan Indeks Williamson yang terjadi peningkatan setiap tahunnya. Yakni, pada tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang bermula pada tahun 2020 yang merupakan tahun awal munculnya Covid-19 hingga berakhir di 2021.

Tahun 2022 sebagai perbaikan ekonomi pasca Covid-19, ketimpangan tersebut tetap meningkat hingga di tahun 2023 dengan angka 0,569 poin. Sehingga, Ketidakmerataan dalam pembangunan berdampak pada potensi pertumbuhan suatu wilayah sehingga beberapa daerah dapat mengalami pertumbuhan yang cepat sedangkan beberapa daerah lainnya tumbuh lebih lambat. Hal ini menjadi penyebab utama ketimpangan pembangunan maupun pendapatan antar daerah. Adapun Indeks Williamson yang dimaksud yaitu suatu pengukuran untuk melihat ketimpangan pembangunan suatu daerah. Koefisien indeks williamson sendiri dinyatakan dalam bentuk rasio yang memiliki nilai antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 maka menunjukkan ketimpangan tertinggi pada suatu daerah, begitu pula sebaliknya jika rasionya 0 maka telah terjadi pemerataan yang sempurna (Perwitasari, Radjab, 2023).

Bukan hanya ketimpangan pembangunan yang menjadi pemicu terjadinya peningkatan kemiskinan di Sulawesi Selatan. Di dalamnya termasuk Angka Harapan Hidup (AHH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Inflasi. Sektor kesehatan juga turut berperan dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai alat ukur. Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Sulawesi Selatan mengalami kemajuan dalam kurung waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2019 AHH meningkat 70,43 Tahun menjadi 71,22 Tahun pada tahun 2023. Selama periode tersebut, AHH Sulawesi Selatan rata-rata tumbuh 0,79 setiap tahunnya. Bahkan sejak tahun 2017 AHH telah naik dari level sedang menjadi tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang juga mulai membaik

pasca Covid-19. Bahkan, AHH tahun 2023 tumbuh sebesar 0,25 tahun dari tahun sebelumnya yakni sebesar 70,97 pada tahun 2022.

Berdasarkan data tersebut yang menunjukkan pertumbuhan harapan hidup yang membaik akan sejalan dengan kualitas sosial dan ekonominya (Rusdi, 2023). Terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ketika terjadi peningkatan produksi barang dan jasa dibandingkan tahun sebelumnya. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi sebagai pertumbuhan ekonomi yaitu jika di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu mengalami perkembangan ekonomi yang lebih cepat, dan peningkatan output yang lebih signifikan, hal ini mengindikasikan prospek perkembangan yang lebih baik. Setelah mengetahui sumber pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, maka dapat diputuskan bidang mana yang akan menjadi fokus pembangunan (Sabyan & Widyanti, 2022). Salah satu cara untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

PDRB Merupakan indikator ekonomi penting yang menunjukkan total nilai hasil produksi barang dan jasa disuatu wilayah selama kurung waktu tertentu, umumnya satu tahun. Angka PDRB mencerminkan performa ekonomi daerah dan menjadi tolak ukur kemajuannya. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan PDRB sebagai nilai seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB juga dapat diartikan sebagai total nilai tambah yang dihasilkan oleh semua unit usaha di suatu wilayah atau total nilai barang dan jasa akhir yang diciptakan oleh seluruh unit ekonomi di wilayah tersebut (Sam *et al.*, 2021)

Pada periode 2019-2023 PDRB Sulawesi Selatan meningkat sebesar 46.773.04 M pada tahun 2023. Meskipun kenaikan ini berfluktuatif selama periode ini, berbanding dengan angka kemiskinan justru meningkat dari periode 2022-2023 ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat sama sekali belum meningkat. Sehingga, tingkat daya beli masyarakat mengalami penurunan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Daya beli ini dapat diukur melalui tingkat inflasi yang mempengaruhi harga barang dan jasa yang diperlukan untuk kebutuhan dasar. Jika inflasi naik, hal ini akan mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat (Arief *et al.*, 2023).

Selama periode 2019-2023 inflasi di Sulawesi selatan cenderung menurun. Pada tahun 2019 inflasi Sulawesi Selatan mencatat sebesar 2,35% dan semakin menurun di tahun 2020 sebesar 2,04%. Lalu ditahun berikutnya meningkat sebesar 2,40%. Kemudian di tahun 2022 mencapai angka 5,77%, dimana tahun tersebut menjadi angka inflasi tertinggi selama lima tahun terakhir. Namun, di tahun 2023 mencatat inflasi sulawesi selatan menurun sampai di angka 2,81%. Tapi, sekali lagi penurunan inflasi ini tidak diiringi dengan menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan yang justru meningkat di tahun 2023.

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu penelitian Iffah Hafizah (2022) yang menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan kapasitas fiskal terhadap tingkat kemiskinan pada kabupaten/kota di Provinsi

Sulawesi Selatan pada tahun 2010-2021. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juardi, Muh. Arief Ariyanto Ahmad, Baso Iwang (2023) menggunakan variabel Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB dan Inflasi. Wardihan Sabar (2022) menjelaskan bahwa variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, dan ketimpangan pendapatan. Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya yakni menggunakan variabel PDRB, dan Inflasi. Adapun kebaruan dalam penelitian ini yaitu menambahkan variabel ketimpangan pembangunan dan Angka Harapan Hidup serta membahas keempat variabel tersebut secara holistik begitu pula range waktu yang digunakan yakni lebih lama dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

Melihat fenomena tersebut, bahwa beberapa indikator kinerja ekonomi berkembang, seperti AHH dan PDRB yang meningkat dan juga laju inflasi yang menurun. Sehingga, menunjukkan perkembangan ekonomi yang lebih baik. Tapi, kontribusi tersebut nyatanya belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan maupun ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan yang meningkat terutama di tahun 2022 hingga 2023. Oleh karena itu penelitian ini harus dilakukan untuk memahami pengaruh beberapa variabel tersebut sehingga dapat menemukan kebijakan dalam mengurangi ketimpangan pembangunan serta kemiskinan tersebut.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini mengadopsi paradigma kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder yang dapat diolah untuk menghasilkan estimasi kuantitatif yang tepat. Data yang telah dikumpulkan sebelumnya dianalisis untuk mengidentifikasi hubungan atau keterkaitan antar variabel. Dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pengaruh variabel bebas (independen) yaitu Ketimpangan pembangunan, Angka Harapan Hidup (AHH), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan inflasi. Sedangkan variabel terikat (dependen) yaitu tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini melibatkan hipotesis berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) maupun dari literatur lainnya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksplanatori, Pendekatan ini bertujuan untuk lebih dari sekedar menggambarkan fenomena atau mengidentifikasi hubungan antara variabel tetapi juga untuk menentukan mengapa hubungan tersebut terjadi. Sehingga, peneliti tidak hanya fokus pada mengamati fenomena atau mengukur korelasi antar variabel tetapi juga untuk memahami mekanisme dibalik hubungan tersebut (Sabar, 2019). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu model regresi linear berganda dengan menggunakan Eviews yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketimpangan pembangunan, AHH, PDRB dan inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Sehubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini, maka akan dilakukan analisis berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan analisis sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4) \quad (1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu \quad (2)$$

Estimasi koefisien regresi, maka transformasi ke bentuk linear variabel yang merupakan satuan (%) dengan memakai logaritma natural (Ln) yaitu dengan menghitung nilai elastisitas dari variabel bebas tertentu terhadap variabel terikat ke dalam model. Menurut Sugiyono, (2012) penggunaan Logaritma Natural (Ln) dalam penelitian dimaksud untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan dan untuk mengurangi gejala multikolinearitas serta heteroskedastisitas. Namun, penggunaan Ln tidak selalu diperlukan dalam setiap model regresi linier, melainkan harus menguji terlebih dahulu apakah dalam model regresi tersebut terdapat gejala multikolinearitas dan juga heteroskedastisitas. Sehingga, akan diperoleh persamaan Ln berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 X_4 + \mu \quad (3)$$

Dimana Y adalah tingkat kemiskinan, β_0 adalah konstanta, β_1 - β_4 adalah koefisien regresi variabel, Ln merupakan Logaritma natural, X1 adalah ketimpangan pembangunan yang diukur menggunakan indeks williamson dalam satuan (poin), X2 adalah Angka Harapan Hidup dalam satuan (Tahun), X3 adalah PDRB dalam satuan (Miliar rupiah), dan X4 adalah inflasi dalam satuan (%) serta μ adalah error term. Penelitian ini dilakukan beberapa pengujian seperti uji asumsi klasik untuk mengetahui kelayakan model regresi, uji tersebut harus melalui uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Yang kedua harus melewati uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji F, serta uji determinasi atau R-square.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan di mana seseorang atau sekelompok masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk menjalani dan meningkatkan kualitas hidup mereka. BPS bahkan beberapa negara lain juga mendefinisikan kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar non-makanan berdasarkan pengukuran pengeluaran. perubahan selama 19 tahun terakhir, dari tahun 2005 hingga 2023, tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan telah mengalami perubahan yang signifikan. Data ini menunjukkan persentase kemiskinan yang terus berfluktuasi dengan variasi yang cukup beragam.

Ketimpangan pembangunan menunjukkan bahwa data tersebut mengalami kenaikan secara bertahap, pada tahun 2005-2023. Pada tahun 2005 indeks Williamson yang menunjukkan tingkat ketimpangan pembangunan sebesar 0,411 poin terjadi peningkatan menjadi 0,569 poin pada tahun 2023, terjadi kenaikan sebesar 0,158 poin selama 19 tahun terakhir. Hal tersebut menunjukkan terjadinya fluktuasi dalam peningkatan Indeks Williamson dari tahun hingga tahun berikutnya terutama pada tahun 2016 yang mencapai

tingkat tertinggi yakni sebesar 0,610 poin walaupun terjadi penurunan di tahun selanjutnya namun kembali menunjukkan kenaikan seiring waktu selama enam tahun terakhir. Peningkatan tersebut diakibatkan oleh berbagai faktor terutama di tahun 2020 hingga 2021 yang mengalami pandemi Covid-19. Peningkatan angka IW ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Indonesia terutama di Sulawesi Selatan masih sangat tinggi.

Pertumbuhan pembangunan manusia dari tahun 2005 hingga 2023 menggunakan indikator kesehatan dalam hal ini Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai pengukurannya. AHH merupakan indikator yang mengukur kualitas hidup seseorang dengan menghitung rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani hingga mencapai ulang tahun ke-x. AHH juga sering kali dikaitkan dengan tingkat kemajuan suatu daerah, dimana wilayah yang tertinggal biasanya memiliki harapan hidup rendah, sementara daerah yang lebih maju cenderung memiliki harapan hidup yang lebih tinggi. Pada tahun 2005 AHH Sulawesi Selatan sebesar 62,27 Tahun, berselang 19 tahun berikutnya yakni tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 8,5 Tahun, hal ini menunjukkan peningkatan positif dan banyaknya masyarakat yang mampu meningkatkan kapasitas hidupnya.

Jumlah PDRB yang dihasilkan terjadi peningkatan secara bertahap dari tahun 2005-2023. Tahun 2005 PDRB Sulawesi Selatan sebesar Rp.121.701,24 Miliar kemudian meningkat di tahun berikutnya, begitupun tahun-tahun berikutnya semakin meningkat hingga mencapai Rp 377.378,17 Miliar pada tahun 2023 yang meningkat Rp16.503,99 Miliar dari tahun sebelumnya. Hal ini dapat menandakan bahwa daerah tersebut mengalami kemajuan dari waktu ke waktu.

Persentase tingkat inflasi yang mengalami penurunan secara bertahap dari tahun 2005 hingga tahun 2023. Tahun 2005 adalah tingkat inflasi tertinggi yakni mencapai angka sebesar 15,2% dan mengalami penurunan di tahun berikutnya walaupun tingkat inflasi ini cukup mengalami fluktuasi pada 19 tahun terakhir. Namun, tahun 2023 mencatat inflasi di Sulawesi Selatan sebesar 2,81% yang mengalami penurunan 2,96% dari tahun sebelumnya yang mencapai 5,77%. Ini menandakan bahwa pemerintah berhasil mengendalikan inflasi di Sulawesi Selatan walaupun masih lebih tinggi dari inflasi yang tercatat skala nasional yakni sebesar 2,61%.

Selanjutnya, hasil pengujian asumsi klasik, yaitu uji normalitas. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan apakah data variabel independen dan variabel dependen terdistribusi normal maupun tidak normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (JB) untuk mengevaluasi normalitas data. Uji (JB) memiliki ketentuan bahwa jika nilai signifikan atau probabilitas lebih besar dari 0.05 maka data tersebut dinyatakan terdistribusi normal, sebaliknya jika lebih kecil dari 0.05 maka data tersebut dianggap tidak terdistribusi normal.

Tabel 1. Estimasi Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Variabel Independen	β	Prob
Ketimpangan Pembangunan (X1)	4.451869	0.1818
Angka Harapan Hidup (X2)	-0.449384	0.0000
PDRB (X3)	-2.09468	0.0082
Inflasi (X4)	0.073424	0.0733
Kostanta	64.40363	0.0000
F-statistic		0.000000
R-Square (R2)		0.970480
Adjusted (R2)		0.962046
Jarque Bera		0.551174
Centered VIF		<10
White		0.2002
LM-test		0.4736

Sumber: Output data sekunder setelah diolah, 2024.

Hasil uji normalitas dalam penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0.551174, yang melebihi nilai 0.05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini terdistribusi normal dan layak digunakan.

Uji Multikolinearitas digunakan untuk menentukan apakah ada korelasi antara variabel bebas (X) dengan variabel bebas lainnya. Model regresi yang ideal adalah model yang tidak menunjukkan korelasi variabel yang tinggi, karena akan menyebabkan kesulitan dalam memahami hasil regresi. Penelitian ini menggunakan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk mengukur multikolinearitas yang memiliki ketetapan bahwa jika nilai VIF melebihi > 10 maka menunjukkan terjadinya multikolinearitas yang signifikan. Sebaliknya, jika nilai VIF kurang dari < 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa nilai dari centered VIF variabel independen ketimpangan pembangunan (X1), AHH (X2), PDRB (X3) dan Inflasi (X4) memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian ini dilakukan untuk mengevaluasi kesamaan varians dan residual pengamatan dalam model. Model yang menunjukkan ketidaksamaan varians (heteroskedastisitas) dianggap kurang baik. Dalam penelitian ini, digunakan uji White untuk mendapatkan nilai probabilitas dari Obs*R Squared. Jika nilai probabilitas signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya kurang dari 0,05, maka terdapat indikasi heteroskedastisitas dalam model. Dari Tabel 1 menunjukkan hasil nilai signifikansi probabilitas Chi-Square adalah 0.2002 > 0.05 oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Pengujian ini memiliki tujuan mengetahui adanya efek gangguan di periode saat ini (t) dan pada periode sebelumnya (t-1). Uji autokorelasi mengevaluasi kekuatan dan menentukan apakah terdapat autokorelasi di dalamnya. Pengujian ini menggunakan uji Breusch-Godfrey yang juga dikenal

sebagai Uji *Lagrange Multiplier* (LM Test) digunakan untuk menentukan keberadaan autokorelasi dalam data. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0.05, maka tidak terdapat autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai probabilitas signifikansi kurang dari 0.05, maka terdapat autokorelasi. Berdasarkan Tabel 1. menunjukkan bahwa nilai prob. Chi-Square adalah $0.4736 > 0.05$ dan hal tersebut menunjukkan bahwa dalam model regresi penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

Pengujian berikutnya adalah uji hipotesis, pengujian ini digunakan untuk menguji suatu pernyataan berdasarkan analisis data. Adapun pengujian yang pertama adalah uji (t) ini digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Untuk mengukur variabel bebas yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial (Uji T) adalah 5% dari taraf signifikansinya terhadap variabel terikat. Apabila nilai probabilitas dan signifikansinya $<$ nilai ($\alpha = 0.05$). Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan hasil koefisien regresi dengan memperoleh persamaan berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \mu \quad (4)$$

$$Y = 64.40 + 4.45X_1 - 0.44X_2 - 2.09X_3 + 0.073X_4 + \mu \quad (5)$$

Dari hasil persamaan (5) di atas, maka dapat diinterpretasikan bahwa:

Ketimpangan pembangunan (X_1) membuktikan bahwa variabel tersebut memiliki nilai probabilitas sebesar 0.1818 yang dimana hal tersebut lebih besar daripada 0.05. Oleh karena itu, ketimpangan pembangunan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara itu, variabel Angka Harapan Hidup (AHH) (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0000, yang lebih kecil dari 0.05, menunjukkan bahwa AHH memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Variabel PDRB (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0082 dengan dimana hal tersebut lebih kecil dari 0.05. Menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel Inflasi (X_4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0733 lebih kecil dari 0.05. Menunjukkan bahwa variabel inflasi berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Persamaan (5) maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien β_1 sebesar 4.45 artinya apabila terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan (X_1) sebesar 1% bisa meningkatkan tingkat kemiskinan (Y) sebesar nilai koefisien.
2. Nilai koefisien β_2 sebesar -0.44 artinya jika AHH (X_2) naik sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan (Y) sebesar nilai koefisien.
3. Nilai Koefisien β_3 sebesar -2.09 menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan PDRB sebesar 1% maka tingkat kemiskinan (Y) akan turun sebesar nilai koefisien.

4. Nilai koefisien β_4 sebesar 0.07 artinya jika terjadi peningkatan inflasi sebesar 1% maka akan meningkatkan kemiskinan (Y) sebesar nilai koefisien.

Uji F merupakan cara untuk membuktikan bahwa semua variabel independen yang terdiri dari ketimpangan pembangunan, AHH, PDRB dan inflasi secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Uji F memiliki pertimbangan kriteria yaitu ketika keempat variabel independen dinyatakan memberikan pengaruh secara bersamaan pada variabel dependen ketika nilai probabilitas nilai (F-satistic) < 0.05 sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sebaliknya, ketika keempat variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh secara bersamaan ketika nilai probabilitas (F-statistic) maka model dinyatakan tidak signifikan ketika nilainya melebihi 0.05, sehingga H_1 ditolak dan H_0 diterima. Berdasarkan Tabel 1 hasil uji simultan menunjukkan hasil nilai probabilitas (F-statistic) sebesar $0.000 < 0,05$ dimana variabel independen (X) secara bersamaan berpengaruh terhadap variabel dependen (Y).

Koefisien Determinasi (R^2) atau lebih dikenal dengan R-Squared merupakan uji untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Kriteria nilai koefisien determinasi adalah semakin mendekati 0 atau sama dengan nol maka semua variabel independen dalam model ini memiliki kapasitas yang rendah dalam menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Namun sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi mendekati angka 1 atau sama dengan satu maka dapat dikatakan bahwa variabel independen mampu menjelaskan sebuah variasi dalam dependen. Berdasarkan tabel 1 koefisien determinasi disesuaikan (Adjusted R-squared) menunjukkan nilai sebesar 0.96 artinya variabel independen dapat menjelaskan nilai variabel dependen sebesar 96%, sisanya 4% dari variasi variabel yang dijelaskan di luar penelitian.

1. Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Terhadap Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan metode analisis regresi linear berganda pada Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel ketimpangan pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini berarti bahwa ketika terjadi peningkatan pembangunan di daerah yang lebih maju, tidak secara langsung menyebabkan penurunan angka kemiskinan di wilayah yang masih tergolong miskin. Jadi, meskipun terjadi peningkatan ketimpangan pembangunan di suatu wilayah setiap tahunnya, tidak akan memberikan dampak yang begitu berarti terhadap kemiskinan. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sani & M Irsyad, 2023) dan Ginting (2024) yang menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut bisa terjadi karena ada faktor lain yang lebih dominan seperti tingkat pendidikan dan layanan kesehatan. Selain itu, kebijakan pemerintah yang pro-poor dan program

pengentasan kemiskinan yang efektif dapat menjadi faktor penyangga yang mengurangi dampak negatif ketimpangan.

hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hipotesis yang diinginkan peneliti begitu pula dengan teori yang dijelaskan oleh Myrdal dimana ketimpangan pembangunan terjadi karena adanya *Backwash effect* dan *spread effect* yang mengakibatkan banyak masyarakat bermigrasi ke daerah yang lebih maju sehingga daerah terbelakang sulit untuk berkembang, begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi yang terpusat di daerah maju membuat daerah lain sulit untuk berkembang. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi dasar Myrdal mengatakan bahwa ketimpangan pembangunan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Teori Myrdal tersebut sejalan dengan penelitian yang diperoleh oleh Meitora (2022) yang memperoleh hasil ketimpangan pembangunan berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung. Begitu pula (Tuah, 2023) yang menjelaskan bahwa ketimpangan pembangunan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di wilayah Kalimantan serta penelitian (Harlina & Manduapessy, 2023) bahwa ketimpangan pembangunan berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Mimika. Sehingga, pada penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diharapkan oleh peneliti, yang berarti bahwa ketimpangan pembangunan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan selama periode pengamatan.

2. Pengaruh AHH terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan

Berdasarkan hasil regresi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel andakan bahwa AHH berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi peningkatan AHH, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Menurut Amartya Sen yang berfokus pada kebebasan dan kapabilitas individu menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya tentang pendapatan melainkan juga ketidakmampuan individu mencapai hidup layak.

Menurut BPS, AHH merupakan salah satu alat untuk mengukur kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan khususnya untuk meningkatkan tingkat kesehatan. Jika suatu daerah memiliki AHH yang rendah maka daerah tersebut perlu mengadakan program pembangunan kesehatan dan sosial seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori serta program pengentasan keiskinan. Hal ini dikarenakan daerah yang memiliki kualitas hidup yang baik mencerminkan kesejahteraan dan keberhasilan program yang dilaksanakan.

Sehingga, penelitian ini sesuai dengan hipotesis yang diinginkan oleh peneliti. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Wulandari, 2022) yang menjelaskan bahwa AHH berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Begitupun penelitian yang dilakukan oleh (Kevin, 2023) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa AHH memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Provinsi Jawa Tengah. Namun, hasil penelitian ini tidak sependapat

dengan penelitian Fitri (2023) di Kabupaten Solok Selatan dan Gunawan (2020) di Kalimantan Barat yang menunjukkan bahwa AHH berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh (Naukko, 2022) yang menjelaskan bahwa AHH berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Tana Toraja.

3. Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Selatan

Selain pertumbuhan PDRB sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, penting juga untuk mencapai pendapatan yang merata di seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi kesenjangan sosial. Penurunan konsumsi masyarakat dapat mengakibatkan penurunan PDRB, sementara peningkatan PDRB dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan. menunjukkan bahwa PDRB berperan penting dalam menurunnya tingkat kemiskinan seperti yang disebutkan dalam penelitian Herlambang & Rachmawati (2023), PDRB memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Temuan ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Manangkalangi et al. (2020), yang menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah pada periode 2000-2018. Hal ini menegaskan bahwa peningkatan PDRB dapat membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut teori Pertumbuhan Ekonomi yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang menggunakan pengukuran PDRB dapat dicapai melalui tiga cara, yakni akumulasi modal, kemajuan teknologi dan tenaga kerja. Adapun tiga sektor penyumbang PDRB terbesar di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 yakni Sektor Perdagangan yaitu sebesar 17,32%; Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yang berkontribusi sebesar 14,39%; Serta sektor jasa dan lainnya sebesar 14,29%. Sehingga variabel PDRB dapat dipertimbangkan dalam menangani kemiskinan.

Namun, ada penelitian yang menyatakan bahwa PDRB dapat memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, seperti yang dilakukan oleh Wahdati (2018) dalam studi tentang pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Jawa Tengah. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Akoum (2008) menunjukkan bahwa di beberapa negara berkembang, meskipun pertumbuhan ekonomi tinggi, tidak selalu mengurangi tingkat kemiskinan dengan signifikan. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memastikan peningkatan kualitas hidup untuk seluruh masyarakat untuk bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri, termasuk masyarakat miskin. Sederhananya, jika PDRB mengalami peningkatan maka angka kemiskinan cenderung turun namun hal tersebut tidak selalu terjadi jika tidak diiringi penataan unsur kelembagaan daerah yang baik

4. Pengaruh Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil regresi sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 menandakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga, penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diinginkan oleh peneliti dan sejalan dengan teori penelitian. Menurut Sjafrizal (2018) jika harga barang naik secara keseluruhan, jumlah orang miskin akan mengalami perubahan, begitu pula menurut Sukirno (2002) menjelaskan bahwa inflasi mengurangi daya beli masyarakat karena kenaikan upah tidak sebanding dengan kecepatan kenaikan harga. Akibatnya, upah riil setiap masyarakat dengan pendapatan tetap akan menurun. Sehingga, ini menunjukkan bahwa inflasi dapat meningkatkan kemiskinan walaupun tergolong rendah dari faktor lainnya.

Walaupun tidak sejalan dengan hipotesis, penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana penelitian tentang hubungan dan efek inflasi terhadap kemiskinan secara regional menunjukkan bahwa hubungan keduanya positif. Namun, tingkat inflasi tidak berdampak pada tingkat kemiskinan sejalan dengan hal tersebut dapat dilihat dari penelitian Halim *et al.*, (2022); Hambarsari & Inggit, (2016); Ihsan, (2018); Kevin *et al.*, (2020). Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa setiap daerah dapat mengontrol tingkat inflasinya sehingga tidak mempengaruhi tingkat kemiskinan secara signifikan. Oleh karena itu, meskipun pengaruh inflasi terhadap kemiskinan mungkin tidak signifikan di beberapa tempat, itu tidak berarti bahwa mengabaikan tingkat inflasi. Inflasi adalah indikator makro ekonomi yang penting dan harus diawasi agar tidak melampaui batas kewajaran, yang akan menjerumuskan masyarakat ke dalam jurang kemiskinan.

Berbeda dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki pengaruh positif signifikan yakni penelitian Ningsih & Andiny, (2018) dan Salim & Purnamasari, (2021) yang menemukan bahwa tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Serta Madiatillah, (2021) yang menemukan bahwa Inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Sumatera Selatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Variabel ketimpangan pembangunan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023. Hal ini berarti bahwa meningkatnya ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan tidak secara langsung menyebabkan peningkatan tingkat kemiskinan yang signifikan. Hal tersebut disebabkan perbedaan pendapatan setiap daerah dan juga untuk pengukuran ketimpangan pembangunan di Sulawesi Selatan masih termasuk kategori sedang. Variabel AHH memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023. Artinya, ini menunjukkan bahwa peningkatan AHH secara signifikan memberikan kontribusi positif terhadap

penurunan tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi dalam kesehatan merupakan strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan.

Variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2023. Ini menunjukkan bahwa meningkatnya PDRB di Sulawesi Selatan secara signifikan berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan. Hal itu pula menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang penting dalam pengentasan kemiskinan. Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2005-2023. Artinya, meningkatnya inflasi di Sulawesi Selatan tidak selalu diikuti dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi faktor lain seperti, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah, adaptasi masyarakat, dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa implikasi kebijakan yang dapat diambil seperti peningkatan kualitas kesehatan di semua tingkatan, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Stimulasi pertumbuhan ekonomi dimana upaya peningkatan PDRB perlu untuk terus dilakukan namun dengan tetap memperhatikan pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir yaitu program pengentasan kemiskinan yang tertarget, dimana program pengentasan kemiskinan harus dirancang secara spesifik untuk mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti masyarakat miskin di daerah pedesaan atau masyarakat adat. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu kualitas data dan ketersediaan yang memiliki beberapa tahapan, model yang digunakan tidak sepenuhnya menangkap kompleksitas hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Hasil penelitian ini juga tidak dapat di generalisasikan ke wilayah lain dengan karakteristik berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- (1) Aeni, N. (2017). Eksistensi Buruh Migran Perempuan Dan Gambaran Kemiskinan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK*, 13(2), 139-148. <https://doi.org/10.33658/jl.v13i2.101>
- (2) Arief, M., Ahmad, A., & Iwang, B. (2023). Analisis Jumlah Penduduk, Tingkat Pendidikan, PDRB, dan Inflasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Analysis of Population, Education Level, GRDP and Inflation on Poverty in South Sulawesi Province. 3, 14-24.
- (3) Fitri, Y., Arum, P. R., & Imron, A. (2023). Pengaruh Rata-Rata. 1(1), 27-33. <http://journalnew.unimus.ac.id/index.php/jodi>
- (4) Ginting, A. L. (2020). Dampak Angka Harapan Hidup dan Kesempatan Kerja Terhadap Kemiskinan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 7(1), 42. <https://doi.org/10.24252/ecc.v7i1.13197>

- (5) Harlina, H., & Manduapessy, R. L. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(2), 131–156. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v3i2.403>
- (6) Herlambang, B., & Rachmawati, N. S. A. (2023). Pengaruh Pdrb, Ipm, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 27(1), 52–60.
- (7) I.Perwitasari, M. Radjab, I. L. (2023). *Journal of Scientech Research and Development Volume 5, Issue 2, December 2023*. 5(2), 223–238.
- (8) Manangkalangi, L. K., Masinambow, V. A. J., & Tumilaar, R. L. H. (2020). Analisis Pengaruh PDRB dan Inflasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Tengah (2000-2018). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(3), 66–78.
- (9) Meitinora, R. (2022). Pengaruh PDRB Perkapita, Jumlah Penduduk, Aglomerasi dan Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Wilayah Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Correspondencias & Análisis*, 15018, 1–23.
- (10) Rahman, A., & Alamsyah, M. F. (2019). Pengaruh Pendidikan, Pendapatan dan Konsumsi Terhadap Kemiskinan Masyarakat Migran Di Kota Makassar. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(1), 111. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i1.9546>
- (11) Rusdi, M. (2023). Economics and Digital Business Review Pengaruh Indeks Pembangunan Kemiskinan di Sulawesi Selatan Manusia Terhadap. 4(1), 971–981
- (12) Sabar, W., Iwang, B., & Maisar, M. (2022). Revealing poverty in South Sulawesi with several interrelated development indicators. *Sorot*, 17(3), 129. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.3.129-137>
- (13) Sabar, W. (2019). Efek Belanja Modal Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 6(2), 171.
- (14) Sabyan, M., & Widyanti, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Regional Terhadap Kemiskinan Di Kota Jambi. *Jurnal Menara Ekonomi: Penelitian Dan Kajian Ilmiah Bidang Ekonomi*, 8(3), 1–7. <https://doi.org/10.31869/me.v8i3.3813>
- (15) Sjafrizal. (2008). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 01, 1–15.
- (16) Sani, J., & M Irsyad, N. K. (2023). Analisis Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Mimika. *Journal of Economics and Regional Science*, 3(2), 131–156. <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v3i2.403>

- (17) Sam, M., Pamungkas, I., Muzaini, M., Studi, P., Universitas, M., Palopo, C., Sains, F., Matematika, P. S., & Palopo, U. C. (2021). Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Produksi Galian / Pertambangan Serta Luas Area Perkebunan Dan Perikanan Terhadap Pdrb Provinsi Sulawesi Selatan Galian / Pertambangan Serta Luas Area. 2(1), 72–83.
- (18) Susanto, R., & Pangesti, I. (2021). Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 7(2), 271. <https://doi.org/10.30998/jabe.v7i2.7653>
- (19) Valiant Kevin, A., Bhinadi, A., & Syari'udin, A. (2022). Pengaruh Pdrb, Angka Harapan Hidup, Dan Rata Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2021. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(12), 2959–2968. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.482>